

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survei serta dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Tarif Angkutan Penyeberangan Adalah Tarif Yang Terdiri Dari Tarif Angkutan Penumpang Dan Tarif Angkutan Kendaraan Beserta Muatannya Di Pelabuhan Penyeberangan Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.
2. Bahwa Tarif Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Tahun 2020 **Tidak Relevan** Dengan Kondisi Saat Ini, Karena Terjadinya Perubahan Status Lintasan Dan Perubahan Satuan Unit Produksi (SUP) Di Sistem Manajemen/ Pengelolaan Di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon Tahun 2020.
3. Evaluasi Tarif Pada Lintasan Waai – Umeputih Di Provinsi Maluku Mengalami Perubahan Sesuai Dengan SUP Yang Berlaku Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - a. Apabila Terjadi Kenaikan Satuan Tarif Pada Tarif Yang Baru, Pemerintah Daerah Bupati Maluku Tengah Dapat Melakukan Pengurangan Tarif Paling Tinggi Dengan Diferensiasi Sebesar 20% (Dua Puluh Persen) Dari Tarif Yang Telah Ditetapkan¹.
 - b. Bahwa Kenaikan Satuan Tarif Sekarang Mengikuti Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2019 Yang Menyatakan Bahwa Satuan Unit Produksi Yang Berlaku Sekarang Mengalami Kenaikan Dari Satuan Unit Produksi Terdahulu.

¹ Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2019 Bab IV Pasal 12 ayat 5

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Agar dilakukannya pengawasaan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar yang ditetapkan oleh Menteri setiap enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada pengguna jasa mengenai pemberlakuan tarif yang baru agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan antara operator dan pengguna jasa.
3. Adapun untuk menghindari *gap*² perbandingan tarif antara pihak PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan kemampuan pengguna jasa dibutuhkan kebijakan pemberian subsidi dari Pemerintah baik Pemerintah Daerah Maupun Pemerintah Pusat.

² *Gap* adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial yang diharapkan